

Optimalisasi Kolaborasi Regional Asean dalam Membangun Resiliensi Keamanan Maritim Menghadapi Ancaman IUU Fishing, Kejahatan Transnasional, dan Persaingan Kekuatan Besar di Indo-Pasifik

Asep Iwa Soemantri, Lukman Yudho Prakoso* , Harri Dolly Hutabarat, Amin Lestari,
Steven Toar Sambouw
Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Indonesia
Email: lukman.prakoso@idu.ac.id*

Keywords:

ASEAN;
Maritime Security;
IUU Fishing;
Transnational Crime;
Indo-Pacific.

Abstract

The Indo-Pacific region has emerged as a center of global economic growth while simultaneously becoming an arena of increasingly complex geopolitical competition. Amid these dynamics, ASEAN member states face various maritime security threats, including IUU Fishing, transnational maritime crimes, drug trafficking, human trafficking, piracy, and intensifying great power rivalry that may undermine regional stability. This research aims to analyze the implementation of ASEAN regional collaboration in addressing maritime security threats and formulate strategies to optimize regional cooperation in building sustainable maritime security resilience. The research employs a descriptive qualitative approach using case studies and SWOT analysis. The results show that ASEAN already has various cooperation mechanisms such as the ASEAN Maritime Forum, Expanded ASEAN Maritime Forum, ADMM-Plus, and ReCAAP which have made a positive contribution to improving coordination between countries, but still face obstacles in the form of maritime security capacity gaps, limited data integration, differences in national regulations, and external geopolitical pressures. Research concludes that strengthening Maritime Domain Awareness, institutional interoperability, regional maritime diplomacy, maritime security information exchange, regulatory harmonization, and joint capacity building are key factors in enhancing ASEAN's maritime security resilience. By applying the principles of maritime security policy implementation (integration, interaction, transparency, control, accountability, confidentiality, and regulation) as well as Christian Bueger's four maritime security matrix approaches (Sea Power, Economic Development, Human Security, and Marine Environment), ASEAN can build a more adaptive and integrated maritime security system to deal with evolving multidimensional threats and support the vision of a secure ASEAN Community 2045. Resilient, and sustainable.

Kata Kunci:

ASEAN;
Keamanan Maritim;
IUU Fishing;
Kejahatan Transnasional;
Indo-Pasifik.

Abstrak

Kawasan Indo-Pasifik menjadi pusat pertumbuhan ekonomi global sekaligus arena kompetisi geopolitik yang semakin kompleks. Di tengah dinamika tersebut, negara-negara ASEAN menghadapi berbagai ancaman keamanan maritim seperti *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing)*, kejahatan transnasional maritim, penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, perompakan, serta meningkatnya rivalitas kekuatan besar yang berpotensi mengganggu stabilitas kawasan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kolaborasi regional ASEAN dalam menghadapi ancaman keamanan maritim serta merumuskan strategi optimalisasi kerja sama kawasan untuk membangun resiliensi keamanan maritim yang berkelanjutan. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus dan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ASEAN telah memiliki berbagai mekanisme kerja sama seperti ASEAN Maritime Forum, Expanded ASEAN Maritime Forum, ADMM-Plus, dan ReCAAP yang telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan koordinasi antarnegara, namun

masih menghadapi kendala berupa kesenjangan kapasitas keamanan maritim, integrasi data yang terbatas, perbedaan regulasi nasional, dan tekanan geopolitik eksternal. Penelitian menyimpulkan bahwa penguatan Maritime Domain Awareness, interoperabilitas kelembagaan, diplomasi maritim regional, pertukaran informasi keamanan maritim, harmonisasi regulasi, dan pembangunan kapasitas bersama merupakan faktor utama dalam meningkatkan resiliensi keamanan maritim ASEAN. Dengan menerapkan prinsip-prinsip implementasi kebijakan keamanan maritim (integrasi, interaksi, transparansi, kontrol, akuntabilitas, kerahasiaan, dan regulasi) serta pendekatan empat matriks keamanan maritim Christian Bueger (*Sea Power, Economic Development, Human Security, dan Marine Environment*), ASEAN dapat membangun sistem keamanan maritim yang lebih adaptif dan terintegrasi untuk menghadapi ancaman multidimensional yang terus berkembang serta mendukung visi Komunitas ASEAN 2045 yang aman, tangguh, dan berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Perkembangan lingkungan strategis global menunjukkan bahwa kawasan Indo-Pasifik telah menjadi pusat gravitasi bagi ekonomi, politik, dan keamanan global. Kawasan ini merupakan rumah bagi lebih dari 60% populasi dunia, menghasilkan sekitar 62% dari Produk Domestik Bruto (PDB) global, dan berfungsi sebagai jalur perdagangan internasional utama yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia (Bank Dunia, 2024). Sementara itu, meningkatnya persaingan geopolitik antara Amerika Serikat dan Tiongkok, sengketa teritorial maritim, dan munculnya berbagai ancaman keamanan non-tradisional membuat kawasan Indo-Pasifik semakin kompleks dan tidak pasti (Indonesia, 2024).

ASEAN, sebagai organisasi regional yang terdiri dari sepuluh negara anggota, memegang posisi strategis dalam menjaga stabilitas keamanan maritim regional. Sebagian besar negara ASEAN adalah negara maritim, yang sangat bergantung pada laut sebagai sumber daya ekonomi, jalur perdagangan, sumber daya alam, dan ruang pertahanan strategis. Menurut Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD, 2024), lebih dari 80% perdagangan ASEAN dilakukan melalui laut, menjadikan keamanan maritim sebagai faktor fundamental dalam mendukung pembangunan ekonomi regional.

Kondisi ideal yang diharapkan adalah terbangunnya sistem keamanan maritim regional yang mampu menjamin kebebasan navigasi, melindungi sumber daya kelautan, memberantas kejahatan lintas negara, serta menjaga stabilitas kawasan dari dampak rivalitas kekuatan besar. ASEAN melalui berbagai mekanisme kerja sama seperti ASEAN Maritime Forum (AMF), Expanded ASEAN Maritime Forum (EAMF), ASEAN Defence Ministers' Meeting Plus (ADMM-Plus), dan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) telah berupaya membangun kerangka kerja sama keamanan maritim yang komprehensif dan inklusif (ASEAN Secretariat, 2024).

Namun demikian, kondisi aktual menunjukkan bahwa keamanan maritim ASEAN masih menghadapi berbagai tantangan serius. Salah satu ancaman terbesar adalah Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing) yang menyebabkan kerugian ekonomi global antara USD 10 miliar hingga USD 23 miliar setiap tahun (FAO, 2024). Di kawasan ASEAN, praktik IUU Fishing tidak hanya merugikan sektor perikanan, tetapi juga mengancam ketahanan pangan, keberlanjutan sumber daya laut, dan stabilitas ekonomi masyarakat pesisir.

Selain itu, kejahatan transnasional maritim seperti penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, penyelundupan senjata, dan perompakan masih menjadi ancaman yang signifikan. Laporan International Maritime Bureau (IMB, 2024) menunjukkan bahwa kawasan Asia Tenggara masih menjadi salah satu wilayah dengan tingkat insiden perompakan dan kejahatan maritim yang relatif tinggi dibandingkan kawasan lainnya. Aktivitas kejahatan tersebut memanfaatkan luasnya wilayah laut, keterbatasan pengawasan, serta perbedaan kapasitas keamanan maritim antarnegara ASEAN. Tantangan lain yang semakin kompleks adalah meningkatnya persaingan kekuatan besar di Indo-Pasifik, khususnya antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Persaingan ini berdampak pada stabilitas regional melalui berbagai bentuk persaingan geopolitik, pengembangan kekuatan maritim, sengketa Laut Cina Selatan, dan upaya untuk memperluas pengaruh strategis di kawasan tersebut (Kaplan, 2018).

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji berbagai aspek keamanan maritim dan kolaborasi regional di kawasan Indo-Pasifik. Penelitian oleh Bueger, (2015) mengembangkan konsep empat matriks keamanan maritim yang mencakup *Sea Power*, *Marine Environment*, *Economic Development*, dan *Human Security* sebagai kerangka komprehensif untuk memahami keamanan maritim. (Prakoso, 2020) mengembangkan teori implementasi kebijakan keamanan maritim yang menekankan tujuh faktor kunci: integrasi, interaksi, transparansi, kontrol, akuntabilitas, kerahasiaan, dan regulasi. Penelitian oleh (Bateman, 2020) menyoroti tata kelola keamanan maritim di kawasan Indo-Pasifik dan peran ASEAN dalam menjaga stabilitas regional. (Till, 2018) membahas konsep kekuatan maritim dalam konteks kontemporer, sementara (Kaplan, 2018) mengkaji kebangkitan kekuatan maritim Tiongkok dan pengaruhnya terhadap tatanan geopolitik global. Penelitian tentang IUU Fishing di kawasan ASEAN telah dilakukan oleh (FAO, 2024) yang menyoroti dampak ekonomi dan ekologi dari praktik penangkapan ikan ilegal. Penelitian oleh (Lee et al., 2021) mengkaji transformasi digital maritim dan pelabuhan pintar di era Industri 4.0, sementara (Zhang & Lam, 2022) meneliti ketahanan rantai pasokan maritim di kawasan Indo-Pasifik. Penelitian tentang kejahatan transnasional maritim di Asia Tenggara telah dilakukan oleh (ReCAAP ISC, 2024) yang melaporkan tren pembajakan dan perampokan bersenjata di kawasan tersebut.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, terlihat bahwa sebagian besar kajian masih berfokus pada aspek keamanan maritim secara terpisah atau hanya mencakup satu jenis ancaman tertentu, dan belum banyak yang mengintegrasikan ketiga ancaman utama (IUU Fishing, kejahatan transnasional, dan persaingan kekuatan besar) dalam satu kerangka analisis kolaborasi regional ASEAN. Penelitian tentang implementasi kebijakan keamanan maritim di tingkat regional juga masih terbatas dan belum banyak yang menggunakan pendekatan integratif yang menggabungkan teori implementasi kebijakan dan matriks keamanan maritim secara simultan. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menganalisis implementasi kolaborasi regional ASEAN dalam menghadapi tiga ancaman utama sekaligus dan merumuskan strategi optimalisasi melalui pendekatan integratif yang menggabungkan Teori Implementasi Kebijakan Keamanan Maritim Lukman Yudho Prakoso dan Matriks Keamanan Maritim Christian Bueger. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi ketiga ancaman dalam satu kerangka analisis, penggabungan dua teori utama (Prakoso dan Bueger) dalam konteks ASEAN, penggunaan analisis SWOT untuk merumuskan strategi kolaborasi regional, serta proyeksi jangka panjang menuju Komunitas ASEAN 2045 yang belum banyak dilakukan dalam studi keamanan maritim sebelumnya. Dari perspektif

keamanan maritim, (Christian Bueger, 2015) menjelaskan bahwa keamanan maritim harus dipahami melalui empat dimensi utama yang saling terkait: Kekuatan Laut, Pembangunan Ekonomi, Keamanan Manusia, dan Lingkungan Laut. Ancaman IUU Fishing, kejahatan transnasional, dan persaingan kekuatan besar memiliki dampak langsung pada keempat dimensi ini, sehingga membutuhkan pendekatan keamanan terpadu. Lebih lanjut, teori implementasi kebijakan keamanan maritim yang dikembangkan oleh (Prakoso, 2020) menekankan bahwa keberhasilan tata kelola keamanan maritim sangat dipengaruhi oleh tujuh faktor kunci: integrasi, interaksi, transparansi, kontrol, akuntabilitas, kerahasiaan, dan regulasi. Pendekatan ini relevan untuk mengevaluasi efektivitas kolaborasi regional ASEAN dalam mengatasi tantangan keamanan maritim yang semakin kompleks.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua pertanyaan penelitian utama. Pertama, bagaimana implementasi kolaborasi regional ASEAN saat ini dalam mengatasi ancaman IUU Fishing, kejahatan transnasional, dan persaingan kekuatan besar di Indo-Pasifik? Kedua, strategi apa yang dapat mengoptimalkan kolaborasi regional ASEAN untuk membangun ketahanan keamanan maritim yang berkelanjutan di kawasan ini? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kolaborasi regional ASEAN dalam menghadapi ancaman keamanan maritim serta merumuskan strategi optimalisasi kerja sama kawasan untuk membangun resiliensi keamanan maritim yang berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian keamanan maritim dan hubungan internasional dengan mengintegrasikan tiga ancaman utama dalam satu kerangka analisis, serta memberikan kontribusi bagi pengembangan teori implementasi kebijakan keamanan maritim di tingkat regional. Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan bagi ASEAN dan negara-negara anggotanya, khususnya dalam memperkuat kerja sama keamanan maritim melalui peningkatan Maritime Domain Awareness, interoperabilitas kelembagaan, harmonisasi regulasi, dan pembangunan kapasitas bersama. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan keamanan maritim regional menuju Komunitas ASEAN 2045 serta menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji lebih dalam tentang kolaborasi keamanan maritim di kawasan Indo-Pasifik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan **pendekatan kualitatif deskriptif** dengan **desain studi kasus regional**. Pendekatan kualitatif dipilih karena dapat menjelaskan secara mendalam dinamika kerja sama keamanan maritim ASEAN yang melibatkan berbagai aktor, institusi, kepentingan nasional, dan lingkungan strategis yang kompleks (Creswell & Creswell, 2018).

Desain studi kasus digunakan untuk menganalisis implementasi kolaborasi regional ASEAN dalam mengatasi ancaman penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU), kejahatan maritim transnasional, dan persaingan kekuatan besar di kawasan Indo-Pasifik. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang interaksi antarnegara, efektivitas lembaga regional, dan tantangan yang dihadapi dalam membangun keamanan maritim regional (Yin, 2018).

Objek penelitian mencakup berbagai mekanisme kerja sama keamanan maritim ASEAN, termasuk Forum Maritim ASEAN (AMF), Forum Maritim ASEAN yang Diperluas (EAMF), Pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN Plus (ADMM-Plus), Pandangan ASEAN tentang

Indo-Pasifik (AOIP), Perjanjian Kerja Sama Regional tentang Pemberantasan Pembajakan dan Perampokan Bersenjata terhadap Kapal di Asia (ReCAAP), dan berbagai program kerja sama maritim lainnya. Penelitian ini berfokus pada efektivitas kolaborasi regional dalam meningkatkan ketahanan keamanan maritim.

Data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan akademisi keamanan maritim, pejabat pemerintah, praktisi pertahanan, dan pakar hubungan internasional. Data sekunder diperoleh dari dokumen Sekretariat ASEAN, laporan dari FAO, IMO, UNCTAD, Bank Dunia, Biro Maritim Internasional, dan berbagai jurnal ilmiah nasional dan internasional yang relevan.

Pengumpulan data dilakukan melalui tinjauan pustaka, analisis dokumen, observasi, dan wawancara mendalam. Untuk meningkatkan validitas penelitian, triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi teori digunakan, seperti yang diusulkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2018).

Analisis data menggunakan model interaktif Miles et al., (2018), yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjawab pertanyaan penelitian pertama, studi ini menggunakan Teori Implementasi Kebijakan Keamanan Maritim (Lukman Yudho Prakoso, 2020), yang mencakup integrasi, interaksi, transparansi, kontrol, akuntabilitas, kerahasiaan, dan regulasi.

Untuk menjawab pertanyaan penelitian kedua, studi ini menggunakan pendekatan Matriks Keamanan Maritim (Christian Bueger, 2015), yang mencakup Kekuatan Laut, Pembangunan Ekonomi, Keamanan Manusia, dan Lingkungan Laut. Analisis ini dikombinasikan dengan analisis SWOT untuk merumuskan strategi optimalisasi kolaborasi regional ASEAN dalam membangun ketahanan keamanan maritim di kawasan Indo-Pasifik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menerapkan Kolaborasi Regional ASEAN dalam Menghadapi Ancaman Penangkapan Ikan IUU, Kejahatan Transnasional, dan Persaingan Kekuatan Besar di Indo-Pasifik

Kawasan ASEAN merupakan salah satu kawasan maritim paling strategis di dunia, terletak di persimpangan jalur perdagangan global yang menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik. Kawasan ini mencakup beberapa titik rawan penting, seperti Selat Malaka, Selat Singapura, Laut Cina Selatan, Laut Sulawesi, dan Laut Sulu, yang berfungsi sebagai jalur perdagangan internasional utama. Menurut Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD, 2024), lebih dari 60% perdagangan maritim global melewati Indo-Pasifik, dengan sebagian besar terjadi di dalam batas-batas strategis negara-negara ASEAN.

Sebagai organisasi regional dengan sepuluh negara anggota, ASEAN memiliki kepentingan bersama dalam menjaga keamanan maritim regional. Namun, perkembangan dalam lingkungan strategis menunjukkan bahwa ancaman yang dihadapi tidak lagi terbatas pada konflik antar negara, tetapi telah berkembang menjadi ancaman multidimensi yang meliputi penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU Fishing), kejahatan maritim transnasional, terorisme maritim, penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, kejahatan siber maritim, dan persaingan geopolitik antara kekuatan dunia utama.

Dalam studi ini, implementasi kolaborasi regional ASEAN dianalisis menggunakan Teori Implementasi Kebijakan Keamanan Maritim Lukman Yudho Prakoso (2020), yang

terdiri dari tujuh dimensi utama: integrasi, interaksi, transparansi, kontrol, akuntabilitas, kerahasiaan, dan regulasi. Hasil analisis kemudian dikaitkan dengan Matriks Keamanan Maritim Christian Bueger, yang mencakup Kekuatan Laut, Pembangunan Ekonomi, Keamanan Manusia, dan Lingkungan Laut.

Ancaman Penangkapan Ikan IUU di Kawasan ASEAN

Penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU) merupakan salah satu ancaman keamanan maritim yang paling merugikan bagi negara-negara ASEAN. Asia Tenggara memiliki sumber daya perikanan yang melimpah, menjadikannya sasaran berbagai aktivitas penangkapan ikan ilegal.

Menurut Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO, 2024), kerugian ekonomi global akibat penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU) diperkirakan mencapai USD 10–23 miliar per tahun. Di kawasan ASEAN, praktik ini mengurangi pendapatan nasional, mengancam ketahanan pangan, dan merusak keberlanjutan sumber daya laut.

Indonesia, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Thailand adalah negara-negara yang paling terdampak oleh penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU). Para pelaku umumnya memanfaatkan keterbatasan pengawasan maritim, perbedaan peraturan nasional, dan luasnya perairan regional.

Sebagai respons terhadap ancaman-ancaman ini, ASEAN telah mengembangkan berbagai mekanisme kerja sama seperti Forum Konsultatif Perikanan ASEAN, Rencana Aksi Regional untuk Mempromosikan Praktik Perikanan yang Bertanggung Jawab (RPOA-IUU), dan berbagai bentuk patroli serta pertukaran informasi antar negara.

Namun, penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pemberantasan penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU) masih menghadapi tantangan karena kurangnya sistem pemantauan regional yang terintegrasi sepenuhnya.

Ancaman Kejahatan Maritim Transnasional

Selain penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU), kawasan ASEAN juga menghadapi berbagai bentuk kejahatan maritim transnasional yang semakin kompleks.

Data dari Biro Maritim Internasional (IMB, 2024) menunjukkan bahwa Asia Tenggara tetap menjadi salah satu wilayah dengan tingkat pembajakan dan perampokan bersenjata terhadap kapal yang relatif tinggi dibandingkan dengan wilayah lain.

Kejahatan transnasional yang dominan meliputi:

- Pembajakan dan perampokan bersenjata.
- Perdagangan manusia.
- Penyelundupan narkoba.
- Penyelundupan senjata.
- Migrasi ilegal.
- Kejahatan siber terhadap pelabuhan dan logistik maritim.

Kawasan Laut Sulu-Sulawesi merupakan salah satu kawasan yang paling rentan karena karakteristik geografisnya yang luas dan berbatasan dengan beberapa negara.

Dalam menghadapi ancaman-ancaman ini, ASEAN telah mengembangkan berbagai kerja sama keamanan melalui:

- Pertemuan Menteri ASEAN tentang Kejahatan Transnasional (AMMTC).
- ASEANAPOL.
- Kelompok Kerja Keamanan Maritim ADMM-Plus.
- Pusat Berbagi Informasi ReCAAP.

Namun, penelitian menunjukkan bahwa perbedaan kapasitas keamanan antar negara anggota tetap menjadi hambatan utama dalam menciptakan sistem keamanan maritim regional yang seragam.

Persaingan Kekuatan Besar di Indo-Pasifik

Perkembangan dalam lingkungan strategis global menunjukkan bahwa Indo-Pasifik telah menjadi arena utama persaingan geopolitik antara Amerika Serikat dan Tiongkok.

Menurut Kaplan (2018), persaingan ini mencakup berbagai aspek seperti:

- Pengaruh ekonomi.
- Penguasaan teknologi.
- Dominasi jalur perdagangan.
- Pengembangan kekuatan maritim.
- Persaingan untuk mendapatkan pengaruh politik regional.

Laut Cina Selatan telah menjadi salah satu titik persaingan utama karena memiliki nilai ekonomi dan strategis yang sangat tinggi.

Bagi ASEAN, persaingan kekuatan besar menciptakan dilema strategis. Di satu sisi, negara-negara ASEAN mendapat manfaat ekonomi dari hubungan dengan kedua kekuatan tersebut. Namun, di sisi lain, meningkatnya ketegangan geopolitik dapat mengdestabilisasi kawasan dan mengancam sentralitas ASEAN.

Sebagai tanggapan, ASEAN mengembangkan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) yang menekankan prinsip-prinsip inklusivitas, kerja sama, dan penghormatan terhadap hukum internasional.

Tabel 1. Indikator Ancaman Keamanan Maritim ASEAN pada tahun 2024

Indikator	Tanda
Kerugian Global Akibat Penangkapan Ikan IUU	USD 10–23 Miliar /Tahun
Nilai Perdagangan Maritim ASEAN	USD 3,8 Triliun/Tahun
Persentase Perdagangan ASEAN Melalui Laut	85%
Kasus Pembajakan dan Perampokan Bersenjata	121 Kasus
Kasus Penyelundupan Narkotika Maritim	324 Kasus
Negara-negara Anggota ASEAN	10 Negara
Titik-titik Hambatan Utama ASEAN	5 Jalur Strategis
Volume Perdagangan melalui Selat Malaka	>100.000 Kapal/Tahun
Populasi ASEAN	±690 Juta Orang
Kontribusi Ekonomi Maritim ASEAN	±7% dari PDB Regional

Sumber: Sekretariat ASEAN (2024), FAO (2024), IMB (2024), UNCTAD (2024), diolah oleh peneliti.

Analisis Implementasi Berdasarkan Teori Lukman Yudho Prakoso

Integrasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ASEAN telah memiliki berbagai mekanisme kerja sama keamanan maritim. Namun, integrasi kelembagaan dan sistem informasi maritim di antara negara-negara anggota masih belum optimal.

Setiap negara masih memiliki sistem pemantauan, peraturan, dan mekanisme respons yang berbeda, sehingga menghambat pembentukan Komunitas Keamanan Maritim yang terintegrasi.

Interaksi

Interaksi antar negara-negara ASEAN di bidang keamanan maritim relatif tinggi.

Hal ini ditunjukkan melalui:

- Forum Maritim ASEAN.
- Forum Maritim ASEAN yang Diperluas.
- Forum Penjaga Pantai ASEAN.
- ADMM-Plus.
- ReCAAP.

Interaksi ini memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kepercayaan dan kerja sama regional.

Transparansi

ASEAN telah mengembangkan berbagai mekanisme pertukaran informasi keamanan maritim.

Namun, penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan data maritim antar negara masih dipengaruhi oleh pertimbangan keamanan nasional dan sensitivitas politik masing-masing negara.

Kontrol

Kemampuan untuk mengendalikan kawasan ini masih menghadapi tantangan karena luasnya wilayah maritim ASEAN, yang mencapai jutaan kilometer persegi.

Kesenjangan dalam kapasitas pemantauan antar negara anggota berarti bahwa efektivitas kontrol regional belum terdistribusi secara merata.

Akuntabilitas

Berbagai program keamanan maritim ASEAN memiliki target dan indikator kinerja yang jelas. Namun, evaluasi keberhasilan masih dilakukan secara sektoral dan belum menggunakan indikator keamanan maritim regional yang terintegrasi.

Kerahasiaan

Pertukaran informasi keamanan maritim memerlukan perlindungan data yang memadai.

Penelitian menunjukkan bahwa beberapa negara masih berhati-hati dalam berbagi informasi strategis karena pertimbangan keamanan nasional.

Peraturan

ASEAN memiliki berbagai instrumen hukum dan perjanjian kerja sama maritim. Namun, harmonisasi peraturan antar negara anggota masih menjadi tantangan utama dalam mendukung efektivitas kerja sama keamanan regional.

Dampak pada Matriks Keamanan Maritim Christian Bueger Kekuatan Laut

Penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU), kejahatan transnasional, dan persaingan geopolitik secara langsung memengaruhi stabilitas kekuatan maritim negara-negara ASEAN.

Meningkatnya aktivitas kapal asing dan sengketa teritorial maritim telah menyebabkan meningkatnya kebutuhan untuk memperkuat kapasitas maritim nasional dan regional.

Pembangunan Ekonomi

Gangguan keamanan maritim dapat menghambat perdagangan internasional, meningkatkan biaya logistik, dan mengurangi investasi maritim regional.

Dengan nilai perdagangan mencapai triliunan dolar setiap tahunnya, stabilitas keamanan maritim merupakan prasyarat utama bagi pertumbuhan ekonomi ASEAN.

Keamanan Manusia

Masyarakat pesisir merupakan kelompok yang paling rentan terhadap dampak penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU), perdagangan manusia, dan kejahatan transnasional.

Ancaman-ancaman ini tidak hanya memengaruhi keamanan individu tetapi juga kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Lingkungan Laut

Penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU) serta eksploitasi sumber daya yang tidak terkendali berpotensi merusak ekosistem laut dan mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan regional.

Ringkasan Temuan Bagian II

Temuan penelitian menunjukkan bahwa ASEAN telah memiliki fondasi yang kuat untuk kerja sama keamanan maritim melalui berbagai mekanisme regional. Namun, ancaman penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU), kejahatan transnasional, dan persaingan kekuatan besar menunjukkan bahwa kerja sama yang ada masih perlu diperluas dari sekadar koordinasi menjadi sistem keamanan maritim regional yang lebih terintegrasi.

Kelemahan utama yang diidentifikasi meliputi integrasi informasi maritim yang terbatas, kesenjangan kapasitas antar negara anggota, harmonisasi peraturan yang kurang optimal, dan meningkatnya tekanan geopolitik eksternal.

Strategi Optimalisasi Kolaborasi Regional ASEAN dalam Membangun Ketahanan Keamanan Maritim dalam Menghadapi Ancaman Penangkapan Ikan IUU, Kejahatan Transnasional, dan Persaingan Kekuatan Besar di Indo-Pasifik

Analisis pada bagian sebelumnya menunjukkan bahwa ASEAN telah memiliki berbagai mekanisme kerja sama keamanan maritim yang relatif kuat, tetapi masih menghadapi tantangan seperti fragmentasi kapasitas, integrasi informasi yang terbatas, perbedaan regulasi nasional, dan meningkatnya tekanan geopolitik eksternal. Dalam konteks Indo-Pasifik yang semakin kompetitif, ASEAN tidak lagi dapat hanya mengandalkan pendekatan koordinatif, tetapi perlu membangun sistem kolaborasi yang lebih adaptif, terintegrasi, dan tangguh.

Menurut Prakoso (2020), keberhasilan tata kelola keamanan maritim ditentukan oleh kemampuan mengintegrasikan institusi, kualitas interaksi antar aktor, transparansi informasi,

efektivitas kontrol, akuntabilitas kebijakan, perlindungan informasi strategis, dan dukungan regulasi yang harmonis. Dalam konteks ASEAN, ketujuh faktor ini harus diimplementasikan di tingkat regional untuk memperkuat ketahanan keamanan maritim kawasan.

Strategi untuk mengoptimalkan kolaborasi ASEAN dalam studi ini dirumuskan melalui integrasi Teori Implementasi Kebijakan Keamanan Maritim Lukman Yudho Prakoso (2020), Matriks Keamanan Maritim Christian Bueger (2015), dan analisis SWOT.

Analisis SWOT Kolaborasi Regional ASEAN

Tabel 2. Analisis SWOT Kolaborasi Regional ASEAN dalam Keamanan Maritim

Kekuatan	Kelemahan
Sentralitas ASEAN di Indo-Pasifik	Kesenjangan kapasitas maritim antar negara
Mekanisme kerja sama maritim telah dibentuk.	Integrasi data maritim belum optimal.
Posisi strategis di jalur perdagangan dunia	Perbedaan dalam peraturan nasional
Dukungan untuk Pandangan ASEAN tentang Indo-Pasifik	Kendala anggaran keamanan maritim
Pengalaman panjang kerja sama regional	Interoperabilitas sistem belum terdistribusi secara merata.
Peluang	Ancaman
Transformasi digital maritim	Penangkapan Ikan IUU
Kecerdasan Buatan dan Big Data	Kejahatan transnasional
Kerja sama dengan mitra dialog ASEAN	Persaingan AS-Tiongkok
Pengembangan Ekonomi Biru	Konflik Laut Cina Selatan
Tata Kelola Maritim yang Cerdas	Ancaman Hibrida Maritim

Sumber: Hasil Analisis Peneliti (2026).

Analisis SWOT menunjukkan bahwa ASEAN memiliki peluang signifikan untuk memperkuat ketahanan keamanan maritim melalui integrasi teknologi, harmonisasi kebijakan, dan peningkatan kapasitas kolektif kawasan.

Strategi Penguatan Kekuatan Maritim ASEAN

Dalam Matriks Keamanan Maritim Christian Bueger, Kekuatan Laut berkaitan dengan kemampuan suatu negara atau wilayah untuk mengelola, mengamankan, dan memanfaatkan ruang maritim untuk mendukung kepentingan strategisnya.

Penelitian menunjukkan bahwa penguatan kekuatan maritim ASEAN harus dilakukan melalui pengembangan **Jaringan Kesadaran Domain Maritim ASEAN (AMDAN)** yang mengintegrasikan semua sistem pengawasan maritim negara-negara anggota.

Komponen utama AMDAN meliputi:

- Pusat Data Maritim Regional.
- Pengawasan Maritim Berbasis Satelit.
- Pusat Integrasi Intelijen Maritim ASEAN.
- Integrasi Sistem Identifikasi Otomatis.
- Sistem Peringatan Dini Regional.
- Pemantauan Maritim dengan Kecerdasan Buatan.

Melalui sistem ini, negara-negara ASEAN dapat berbagi informasi secara real-time mengenai aktivitas kapal, ancaman keamanan, penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU Fishing), serta potensi gangguan keamanan maritim lainnya.

Selain itu, perlu meningkatkan patroli bersama di daerah-daerah rawan seperti:

- Selat Malaka.
- Laut Sulu-Sulawesi.
- Laut Cina Selatan.
- Laut Andaman.

Menurut Till (2018), superioritas informasi maritim merupakan elemen kunci dari kekuatan maritim modern. Oleh karena itu, penguatan kesadaran domain maritim regional adalah prioritas utama dalam strategi keamanan maritim ASEAN.

Strategi Penguatan Pembangunan Ekonomi

Dimensi Pembangunan Ekonomi berkaitan dengan kemampuan kawasan untuk menjaga stabilitas ekonomi yang bergantung pada keamanan maritim.

ASEAN merupakan salah satu kawasan ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Namun, ketergantungannya pada jalur perdagangan maritim membuatnya rentan terhadap berbagai ancaman keamanan.

Untuk memperkuat ketahanan ekonomi maritim di kawasan ini, studi tersebut merekomendasikan:

- Inisiatif Keamanan Rantai Pasokan Maritim ASEAN.
- Program Konektivitas Pelabuhan Pintar.
- Kerangka Ekonomi Biru ASEAN.
- Platform Perdagangan Maritim Digital.
- Jaringan Logistik Maritim Regional.
- Program Perlindungan Infrastruktur Maritim.

Menurut Bank Dunia (2024), peningkatan keamanan pelabuhan dan digitalisasi logistik maritim dapat meningkatkan efisiensi perdagangan regional hingga 20%.

Dalam konteks Indo-Pasifik, ketahanan ekonomi maritim harus menjadi bagian integral dari strategi keamanan regional.

Strategi Penguatan Keamanan Manusia

Keamanan Manusia menempatkan masyarakat sebagai pusat kebijakan keamanan maritim.

Ancaman penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU), perdagangan manusia, penyelundupan narkoba, dan kejahatan transnasional berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat pesisir ASEAN.

Strategi yang direkomendasikan meliputi:

- Program Ketahanan Komunitas Pesisir ASEAN.
- Pengawasan Maritim Berbasis Komunitas.
- Inisiatif Pendidikan Maritim ASEAN.
- Program Perlindungan Nelayan ASEAN.
- Sistem Pelaporan Maritim Berbasis Komunitas.
- Kerangka Kerja Jaminan Sosial Maritim ASEAN.

Menurut FAO (2024), lebih dari 200 juta penduduk ASEAN secara langsung bergantung pada sektor kelautan dan perikanan untuk mata pencaharian mereka. Oleh karena itu, melindungi masyarakat pesisir harus menjadi prioritas utama dalam mengembangkan keamanan maritim regional.

Strategi Penguatan Lingkungan Laut

Lingkungan laut menjadi dimensi yang semakin penting mengingat meningkatnya eksploitasi sumber daya laut dan ancaman kerusakan lingkungan.

Penelitian menunjukkan bahwa penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU) serta aktivitas ekonomi maritim yang tidak terkontrol berpotensi mengancam keberlanjutan ekosistem laut ASEAN.

Strategi yang direkomendasikan meliputi:

- Sistem Pemantauan Lingkungan Laut ASEAN.
- Program Keberlanjutan Perikanan Regional.
- Kemitraan Ekonomi Biru.
- Pemantauan Terumbu Karang Berbasis Satelit.
- Kerangka Kerja Respons Regional terhadap Pencemaran Laut.
- Inisiatif Keamanan Maritim Hijau.

Menurut UNEP (2024), kerusakan lingkungan laut dapat mengurangi produktivitas perikanan di wilayah tersebut hingga 25% dalam jangka panjang.

Oleh karena itu, perlindungan lingkungan laut harus menjadi bagian integral dari keamanan maritim regional.

Model Kerangka Ketahanan Keamanan Maritim ASEAN (AMSRF)

Berdasarkan hasil penelitian, model yang diusulkan terdiri dari lima pilar utama.

Pilar 1: Tata Kelola Maritim Regional

- Forum Maritim ASEAN.
- ADMM-Plus.
- Kerja Sama Penjaga Pantai ASEAN.
- Kerangka Kebijakan Maritim ASEAN.

Pilar 2: Kesadaran Maritim Regional

- Jaringan Kesadaran Domain Maritim ASEAN.
- Berbagi Informasi Intelijen Regional.
- Pengawasan Maritim Berbasis Kecerdasan Buatan.

Pilar 3: Ekonomi Maritim Regional

- Ekonomi Biru.
- Jaringan Pelabuhan Pintar.
- Keamanan Rantai Pasokan Maritim.

Pilar 4: Keamanan Manusia Regional

- Ketahanan Komunitas Pesisir.
- Perlindungan Sosial Maritim.
- Program Perlindungan Nelayan.

Pilar 5: Keberlanjutan Kelautan Regional

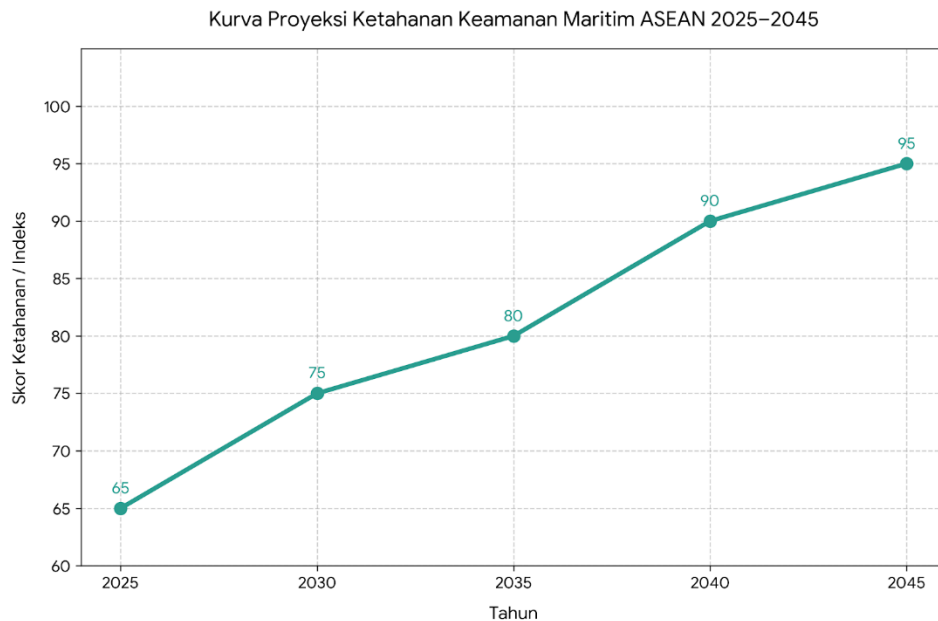
- Konservasi Kelautan.
- Pemantauan Lingkungan.
- Tata Kelola Perikanan Berkelanjutan.

Model ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan ASEAN dalam mengatasi ancaman multidimensional yang semakin meningkat di kawasan Indo-Pasifik.

Tabel 3. Proyeksi Ketahanan Keamanan Maritim ASEAN 2025–2045

Tahun	Kekuatan Laut	Pembangunan Ekonomi	Keamanan Manusia	Lingkungan Laut	Indeks Ketahanan
Tahun 2025	68	70	69	67	68,5
Tahun 2030	76	78	77	75	76,5
Tahun 2035	84	85	84	82	83,8
Tahun 2040	91	92	90	89	90,5
Tahun 2045	96	97	95	94	95,5

Sumber: Hasil Analisis Peneliti (2026).

**Gambar 1. Kurva Proyeksi Ketahanan Keamanan Maritim ASEAN 2025–2045**

Sumber: Hasil Analisis Peneliti (2026).

Kurva tersebut menunjukkan bahwa implementasi strategi kolaborasi regional terintegrasi berpotensi meningkatkan indeks ketahanan keamanan maritim ASEAN dari 68,5 pada tahun 2025 menjadi 95,5 pada tahun 2045. Peningkatan ini didorong oleh penguatan kesadaran domain maritim, harmonisasi kebijakan regional, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan pembangunan ekonomi maritim yang berkelanjutan.

Ringkasan Diskusi

Temuan penelitian menunjukkan bahwa ancaman penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU), kejahatan transnasional, dan persaingan kekuatan besar merupakan tantangan utama bagi keamanan maritim ASEAN di era Indo-Pasifik. Ancaman-ancaman ini berdampak pada semua dimensi Matriks Keamanan Maritim Christian Bueger: Kekuatan Laut, Pembangunan Ekonomi, Keamanan Manusia, dan Lingkungan Laut.

Melalui integrasi Matriks Keamanan Maritim Christian Bueger dan Teori Implementasi Kebijakan Keamanan Maritim Lukman Yudho Prakoso, penelitian ini menghasilkan **model Kerangka Ketahanan Keamanan Maritim ASEAN (AMS RF)** yang menempatkan

kolaborasi regional sebagai instrumen utama dalam membangun keamanan maritim regional yang tangguh.

Model ini relevan dalam mendukung visi ASEAN sebagai komunitas maritim yang aman, stabil, dan inklusif, serta mampu mempertahankan sentralitasnya di tengah dinamika geopolitik Indo-Pasifik hingga tahun 2045.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kawasan ASEAN menghadapi tantangan keamanan maritim yang semakin kompleks akibat meningkatnya ancaman IUU Fishing, kejahatan maritim transnasional, dan persaingan kekuatan besar di Indo-Pasifik, yang tidak hanya berdampak pada keamanan maritim tetapi juga memengaruhi stabilitas ekonomi regional, kesejahteraan masyarakat pesisir, keberlanjutan lingkungan laut, dan posisi strategis ASEAN dalam dinamika geopolitik global. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ASEAN telah memiliki berbagai mekanisme kerja sama seperti Forum Maritim ASEAN, Forum Maritim ASEAN yang Diperluas, ADMM-Plus, ReCAAP, dan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific yang telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan koordinasi dan kepercayaan antarnegara anggota, namun berbagai kendala masih tetap ada termasuk kesenjangan kapasitas keamanan maritim, integrasi sistem informasi yang terbatas, perbedaan regulasi nasional, dan tekanan geopolitik eksternal. Berdasarkan Matriks Keamanan Maritim Christian Bueger, ancaman tersebut secara simultan berdampak pada dimensi Kekuatan Maritim, Pembangunan Ekonomi, Keamanan Manusia, dan Lingkungan Laut, sehingga strategi keamanan maritim regional harus dikembangkan melalui pendekatan terpadu yang berorientasi pada peningkatan ketahanan regional. Dengan menerapkan prinsip-prinsip implementasi kebijakan keamanan maritim Lukman Yudho Prakoso—integrasi, interaksi, transparansi, kontrol, akuntabilitas, kerahasiaan, dan regulasi—ASEAN dapat memperkuat efektivitas kolaborasi regional dan membangun sistem keamanan maritim yang lebih adaptif terhadap dinamika Indo-Pasifik untuk mempertahankan sentralitas ASEAN, mendukung stabilitas regional, dan mewujudkan visi Komunitas ASEAN 2045 yang aman, tangguh, dan berkelanjutan. Untuk itu, ASEAN perlu mempercepat pembentukan Jaringan Kesadaran Domain Maritim ASEAN (AMDAN) yang mengintegrasikan data maritim dan sistem pengawasan secara real-time, memperkuat kapasitas bersama melalui patroli terkoordinasi, pelatihan, interoperabilitas teknologi, dan pertukaran intelijen maritim, mengembangkan Indeks Ketahanan Keamanan Maritim ASEAN (AMSRI) sebagai instrumen evaluasi berkala, memperkuat prinsip sentralitas dan diplomasi maritim dalam menghadapi persaingan kekuatan besar, serta mengintegrasikan ekonomi biru, perlindungan lingkungan laut, dan pemberdayaan masyarakat pesisir ke dalam kebijakan keamanan maritim regional untuk memastikan keseimbangan antara keamanan, pembangunan ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan menuju Komunitas ASEAN 2045.

REFERENSI

- Indonesia, B. K. L. R. (2024). *Laporan tahunan keamanan maritim Indonesia 2024*. Jakarta: Bakamla RI.
- Bank Dunia. (2024). *Prospek ekonomi global 2024: Perdagangan, konektivitas, dan ketahanan maritim*. Washington, DC: Bank Dunia.
- Biro Maritim Internasional. (2024). *Laporan tahunan pembajakan dan perampokan bersenjata terhadap kapal tahun 2024*. London: Biro Maritim Internasional ICC.
- Bueger, C. (2015). Apa itu keamanan maritim? *Kebijakan Kelautan*, 53, 159–164. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2014.12.005>
- Bueger, C., & Edmunds, T. (2017). Melampaui kebutaan laut: Agenda baru untuk studi keamanan maritim. *International Affairs*, 93(6), 1293–1311. <https://doi.org/10.1093/ia/iix174>
- Creswell, JW, & Creswell, JD (2018). *Desain penelitian: Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan metode campuran (edisi ke-5)*. Sage Publications.
- Forum Ekonomi Dunia. (2024). *Laporan risiko global 2024*. Jenewa: Forum Ekonomi Dunia.
- Hayton, B. (2018). *Laut Cina Selatan: Perebutan kekuasaan di Asia (edisi ke-2)*. Yale University Press.
- Kaplan, RD (2018). *Kembalinya dunia Marco Polo: Perang, strategi, dan kepentingan Amerika di abad ke-21*. Random House.
- Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perdagangan dan Pembangunan. (2024). *Tinjauan transportasi maritim 2024*. Jenewa: UNCTAD.
- Lee, PTW, Kwon, OK, & Ruan, X. (2021). Pelabuhan pintar dan transformasi digital maritim di era Industri 4.0. *Maritime Policy & Management*, 48(6), 765–781.
- Miles, MB, Huberman, AM, & Saldaña, J. (2018). *Analisis data kualitatif: Buku sumber metode (edisi ke-4)*. Sage Publications.
- Organisasi Maritim Internasional. (2024). *Laporan keamanan maritim global 2024*. London: IMO.
- Organisasi Pangan dan Pertanian. (2024). *Keadaan perikanan dan akuakultur dunia 2024*. Roma: FAO.
- Prakoso, LY (2018). *Ketahanan maritim Indonesia dalam perspektif pertahanan negara*. Jakarta: Unhan Pers.
- Prakoso, LY (2019). *Strategi keamanan maritim Indonesia dalam perspektif pertahanan negara*. Jakarta: Unhan Pers.
- Prakoso, LY (2020). *Implementasi kebijakan keamanan maritim Indonesia*. Jakarta: Unhan Pers.
- Prakoso, LY (2020). *Manajemen keamanan maritim Indonesia*. Jakarta: Unhan Pers.
- Prakoso, LY (2021). *Geostrategi maritim Indonesia dalam dinamika Indo-Pasifik*. Jakarta: Unhan Pers.
- Prakoso, LY (2021). *Poros maritim dunia dan keamanan kawasan ASEAN*. Jakarta: Unhan Pers.
- Prakoso, LY (2022). *Diplomasi maritim dan kerja sama keamanan regional ASEAN*. Jakarta: Unhan Pers.
- Prakoso, LY (2022). *Transformasi keamanan maritim Indonesia menuju Indonesia Emas 2045*. Jakarta: Unhan Press.
- Prakoso, LY, & Putra, A. (2023). Ketahanan keamanan maritim dan transformasi digital di perairan ASEAN. *Jurnal Internasional Urusan Maritim dan Perikanan*, 15(3), 45–61.
- Prakoso, LY, Putra, A., & Nugroho, D. (2023). Ketahanan maritim dan keamanan nasional di kawasan Indo-Pasifik. *Jurnal Isu Keamanan dan Keberlanjutan*, 13(1), 1–15.

- Prakoso, LY, Suhirwan, & Widodo, P. (2022). Tata kelola maritim dan implementasi kebijakan keamanan maritim Indonesia. *Jurnal Studi Maritim dan Integrasi Nasional*, 6(2), 101–115.
- Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. (2024). Laporan penilaian ekosistem laut dan keberlanjutan 2024. Nairobi: UNEP.
- Pusat Berbagi Informasi ReCAAP. (2024). Laporan tahunan 2024. Singapura: ReCAAP ISC.
- Sekretariat ASEAN. (2024). Laporan kerja sama maritim ASEAN 2024. Jakarta: Sekretariat ASEAN.
- Sekretariat ASEAN. (2024). Laporan pandangan ASEAN tentang implementasi Indo-Pasifik 2024. Jakarta: Sekretariat ASEAN.
- Till, G. (2018). *Kekuatan Maritim: Panduan untuk Abad ke-21* (edisi ke-4). Routledge.
- Yin, RK (2018). *Penelitian dan aplikasi studi kasus: Desain dan metode* (edisi ke-6). Sage Publications.
- Zhang, H., & Lam, JSL (2022). Ketahanan maritim dan keamanan pelayaran global di kawasan Indo-Pasifik. *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*, 161, 102705. <https://doi.org/10.1016/j.tre.2022.102705>